



**KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS REPUBLIK INDONESIA**

**NOTULEN RAPAT**

**Pembahasan Rencana Aksi Keterbukaan Pemerintah 2018-2020**

*Topik: Meningkatkan kualitas akses keterbukaan data anggaran pendidikan, kesehatan dan penanggulangan kemiskinan di Kementerian/ Lembaga dan daerah*

**1. Pelaksanaan**

Hari/ Tanggal : Senin, 3 September 2018  
Waktu : 14.00-16.00 WIB  
Tempat : Ruang Rapat DH-4

**2. Pimpinan Rapat** : Kasubdit Kualitas Pelayanan Publik, Kementerian  
PPN/Bappenas

**3. Peserta Rapat** :

1. Direktorat Penyusunan APBN, Kementerian Keuangan
2. Sub Bagian Evaluasi Program, Kementerian Pendidikan
3. Biro Perencanaan, Kementerian Kesehatan
4. Pusat Data dan Informasi, Kementerian Sosial
5. Biro Perencanaan, Kementerian Sosial
6. Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi, Kementerian Sosial
7. Biro Perencanaan, Kementerian Dalam Negeri
8. Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran  
(Seknas FITRA)
9. Sekretariat Nasional OGI

**4. Pembahasan Rapat**

1. Pertemuan bilateral hari ini dilakukan dalam rangka menindaklanjuti kegiatan Kick Off Rencana Aksi Keterbukaan Pemerintah 2018-2020 yang dilaksanakan pada tanggal 8 Agustus 2018.
2. Rencana Aksi OGI berupaya untuk menajamkan RKP dan Renja K/L

3. Tujuan dari renaksi ini adalah ingin mendorong tersedianya kemudahan akses data anggaran pendidikan, kesehatan dan penanggulangan kemiskinan.
4. Urgensi ketersediaan anggaran partisipatif yang disampaikan oleh FITRA:
  1. Kebutuhan data di masyarakat terus meningkat, bukan sekadar *Citizen Budget Information* secara umum tapi semakin *advance* terkait upaya meningkatkan efisiensi dan efektifitas dana yang digunakan, ketepatan alokasi dana, dan peningkatan optimalisasi penggunaan anggaran untuk kesejahteraan masyarakat. Maka dari itu perlu data yang lebih dalam dan semakin tinggi kualitasnya.
  2. Kedalaman data sampai ke *output* yang dibutuhkan sebagai *evidence-based policy* yang dapat dianalisis untuk melihat ketepatan penggunaan anggaran. Sejauh ini data terkait dengan output anggaran masih sulit untuk diakses baik pada tingkatan Kementerian/ Lembaga maupun Pemerintah Daerah
5. Kondisi keterbukaan anggaran saat ini disampaikan oleh Kemenkeu:
  1. Kementerian Keuangan sudah membuat portal terkait keterbukaan data anggaran yaitu: <http://query.data-apbn.kemenkeu.go.id>. Tujuan awal dibuatnya portal tersebut untuk meningkatkan indeks, namun dampak keterbukaan tersebut cukup positif. Bahkan dapat membawa Menteri Keuangan meraih predikat sebagai menteri terbaik di dunia dalam acara *World Government Summit*.
  2. Terkait kedalaman data keuangan sudah dapat diakses hingga kegiatan. Kemkeu dalam portal data keuangan memfasilitasi masyarakat untuk mengakses petikan DIPA yang disediakan namun formatnya PDF. Namun, kedepannya Kemkeu berkomitmen untuk membuka DIPA dalam format excel
  3. Akses anggaran melalui portal belum ke level output, hingga saat ini sudah ada 20 K/L telah membuka data terkait anggarannya. Kebijakan membuka anggaran pada K/L ini juga masih terkendala oleh perbedaan kebijakan internal PPID di masing-masing kementerian. Ada yang boleh dan tidak, selanjutnya dibutuhkan komitmen K/L untuk mengizinkan Kemenkeu membuka data anggarannya.
  4. Terkait anggaran pendidikan, perlu diperhatikan bahwa terdapat dua sumber data yaitu pusat dan daerah. Data anggaran pendidikan di pusat bisa diakses, dan reachable. Tapi untuk data daerah, pemerintah daerah

punya data sendiri yang belum diintegrasikan. Pengelolaan anggaran yang berbeda, perbedaan tingkat keterbukaan dan pemahaman yang belum sama menjadi tantangan untuk membuka data keuangan di daerah.

6. Keterbukaan anggaran di daerah, masih dalam proses pengembangan oleh Kemendagri melalui portal *e-Budgeting*. Portal *e-Budgeting* ini nantinya akan digunakan sebagai media keterbukaan anggaran daerah, portal ini menjadi salah satu prioritas nasional di Kemendagri.
7. Kemenkeu merasa kesulitan membuat akun (*tagging*) untuk mendorong keterbukaan data anggaran pada level output.
8. Tahapan selanjutnya dari pembahasan rencana aksi ini, perlu dilakukan penyamaan persepsi terhadap data-data keuangan yang dapat dipublikasikan pada level kementerian dan lembaga. Secara paralel juga, OGI melakukan konsultasi ke KIP, dan KIP dilibatkan dalam renaksi ini kedepannya.
9. Perlu untuk dilakukan pertemuan bilateral lanjutan untuk membahas terkait fiksasi indikator capaian dan *milestone* kedepannya.
10. Selanjutnya hasil pertemuan tersebut akan dituangkan dalam template untuk renaksi OGI.

Notulis Rapat

Syifa Amania Afra.

### Ringkasan Hasil Pembahasan Usulan Aksi

Aksi : Meningkatkan kualitas akses keterbukaan data anggaran pendidikan, kesehatan dan penanggulangan kemiskinan di Kementerian/ Lembaga dan daerah.

Latar Belakang :

Keterbukaan data terkait anggaran pendidikan, kesehatan dan penanggulangan kemiskinan masih belum terlaksana secara optimal. Masyarakat kerap sulit untuk mendapatkan data tersebut baik pada level nasional maupun daerah. Untuk itu dibutuhkan komitmen yang konsistensi dalam mempublikasikan data ini.

Aksi	Sasaran Akhir	Indikator Capaian	Penanggung Jawab	K/L/D/I Terkait
Meningkatkan kualitas akses keterbukaan data anggaran pendidikan, kesehatan dan penanggulangan kemiskinan di Kementerian/ Lembaga dan daerah	1. Tersedianya data anggaran pendidikan, kesehatan dan penanggulangan kemiskinan di kementerian/lembaga	1. Terbangunnya komitmen publikasi data anggaran pendidikan, kesehatan dan penanggulangan kemiskinan antara Kementerian Keuangan dan K/L terkait 2. Terpublikasinya data anggaran pendidikan, kesehatan dan penanggulangan kemiskinan sampai dengan level kegiatan di portal data APBN	Kementerian Keuangan	1. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) 2. Kantor Staf Presiden
	2. Tersedianya data anggaran pendidikan, kesehatan dan penanggulangan kemiskinan di pemerintah daerah	3. Terbangunnya portal data APBD (E-budgeting) 4. Terlaksananya implementasi E-Budgeting di 34 provinsi	Kementerian Dalam Negeri	3. Komisi Informasi Pusat